

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI PASCA KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PEKY YIGIBALOM
NPP: 31.1051

*Asdaf Kabupaten Lanni Jaya Provinsi Papua Pegunungan
Program Studi Manajemen Kemanan dan Keselamatan Publik
Email: 31.1051@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Nadya Anggara Putri S.E., M. M

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Lanny Jaya Regency, Papua's mountainous province, is the area most prone to social conflict disasters. From year to year it becomes evident that the conflict in Lanny Jaya Regency is a prolonged conflict. The impact of this conflict caused 89 people to die, 63 people were injured, and many infrastructure were damaged and burned. In terms of dealing with disasters that occur, there is a need for post-conflict rehabilitation. **Purpose:** The aim of the research is to find out how social services perform in post-social conflict rehabilitation, what are the inhibiting factors and what efforts are made by social services to overcome these obstacles. **Method:** With qualitative research methods, triangulation techniques are used in data collection, so regarding the validity of the data, cross-checking will be carried out using the same source but with different methods. **Results/Findings:** The results obtained by measuring organizational performance are based on three indicators, namely service quality, responsiveness, accountability. **Conclusion:** The conclusion that can be made is that the performance of the Social Service in rehabilitating the Lanny Jaya area after the social conflict has met three indicators which are almost in line with expectations of the work results to be achieved; Service Quality, Responsiveness, Accountability, in resources, both human and natural, as well as inadequate infrastructure.

Keywords: Social Conflict, Rehabilitation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten lanny jaya provinsi papua pegunungan menjadi daerah paling rawan bencana konflik sosial. Dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa konflik di Kabupaten lanny jaya merupakan sebuah konflik berkepanjangan. Dampak konflik ini menimbulkan 89 orang meninggal dunia, 63 korban luka-luka, dan banyak sarana prasarana yang dirusak dan dibakar. **Tujuan:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dinas sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial, apa saja faktor penghambat dan apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Dengan metode penelitian kualitatif, digunakan triangulasi teknik dalam pengumpulan data, maka terkait keabsahan data akan dilakukan cara *ricek cross* cek dengan sumber yang sama namun metode yang berbeda. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dengan mengukur kinerja organisasi berdasarkan tiga indikator yaitu kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam merehabilitasi daerah lanny jaya pasca

konflik sosial telah memenuhi tiga indikator yang sudah hampir sesuai harapan akan hasil kerja yang ingin dicapai; Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas. dalam Sumber Daya baik manusia dan alam, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Namun dibalik itu, kondisi daerah lanny jaya dan kehidupan masyarakat sudah cukup pulih, stabil, dan terus berkembang.

Kata kunci: Konflik Sosial, Rehabilitasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai jenis bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor sosial. Heryati (2020) menggambarkan bahwa bencana alam mencakup peristiwa seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Di sisi lain, bencana sosial adalah peristiwa yang diakibatkan oleh tindakan manusia, seperti konflik sosial antar kelompok, kebakaran pemukiman, tindakan terorisme, dan Sabotase (Heryati, 2020). Sejalan dengan hal itu maka Pemerintah menetapkan regulasi untuk penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan undang-undang untuk mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Jenis-jenis bencana di kelompokkan menjadi tiga jenis bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

1. Bencana alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana nonalam

Bencana nonalam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana social

Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

Peran pemerintah dalam menangani bencana sosial ini sangatlah dibutuhkan baik di daerah maupun pusat. Ini bertujuan agar bisa mengurangi sebab, resiko juga dampak yang terjadi dari bencana tersebut. Mendukung tahapan ini, terdapat fase rehabilitasi dengan tujuan utama yaitu untuk perbaikan dan juga pemulihan dari segi aspek pelayanan dan masyarakat untuk wilayah yang terdampak bencana. Upaya ini untuk memenuhi sasaran ataupun target utama dalam mencapai kembali normalnya kondisi atau agar dapat Kembali berjalan dengan wajar segala aspek pemerintahan, beserta kehidupan sosial keseharian masyarakat bagi yang berada pada wilayah terdampak bencana Ditetapkan bahwa dalam rangka mempercepat fase rehabilitasi ini, perlu adanya skala prioritas dalam menjalankan fase rehabilitasi tersebut. Hendaknya dalam menentukan skala prioritas ini didasari hasil analisis mengenai dampak kerugian serta kerusakan yang terjadi sebagai akibat daripada bencana. Bencana merupakan suatu hal yang tidak terkira dan

bersifat serius untuk warga yang memunculkan kehilangan berskala luas serta dialami oleh segala elemen yang berada di wilayah terpasca beserta mempengaruhi ekologi yang ada di wilayah tersebut dan melebihi batas kemampuan manusia guna menanggulangnya. Bencana adalah suatu peristiwa yang tidak biasanya berlangsung diakibatkan oleh alam ataupun perilaku individu, juga di dalamnya ialah pasca dari kekeliruan teknologi yang menimbulkan tanggapan dari komunitas, warga, orang atau area guna membagikan antusiasme yang besar (Wijayanto; 2012).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Konflik papua merupakan salah satu konflik berkepanjangan di Indonesia karena Faktor penyebab konflik sosial meliputi perbedaan perorangan, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat. Sebagai gejala sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat. Ini terjadi karena setiap individual atau kelompok memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, atau dukungan sosial. Salah satu contoh bencana sosial di papua adalah konflik etnis, agama, atau politik yang sering kali mengakibatkan kerusakan dan dampak sosial yang signifikan. Berikut adalah Contoh:

- a. Pada 3 oktober 2000, sejumlah pemimpin di Jayapura mengklaim telah berhasil mencabut aturan pelanggaran bendera Bintang kejora symbol dari kemerdekaan papua oleh pemerintah presiden addurrahman wahid alias gusdur, hingga tiga hari kemudian aparat keamanan melancarkan operasi ke tujuh posko yang mengibarkan bendera di sekitaran wamena 5 orang tewas 40 orang terluka dan ratusan orang mengungsi pasca kejadian ini.
- b. Kerusakan sosial antar kelompok Masyarakat di sertai aksi pembakaran di salah satu tempat hiburan malam terjadi kota sorong papua jumlah korban yang di informasih dari dinas Kesehatan adalah sebanyak 19 Orang terdiri dari 4 meninggal dan 15 orang luka luka 5 luka berat dan 10 orang lainnya luka ringan.
- c. Kejadian bermula dari adanya mobil penjual kelontong yang disetop oleh dua warga di Sinakma, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis sekitar pukul 12.30 WIT. Mobil dihentikan lantaran dicurigai melakukan penculikan anak. Atas isiden ini korban luka-luka dari aparat ada 18 orang 16 diantaranya terkena batu dan jumlah korban yang di informasih dari din2 orang terkena panah yakni 1 perwira polisi 1 anggota tni. 14 warga mengalami luka luka dan 13 rumah yang di bakar saat kerusakan pecahas Kesehatan adalah sebanyak 19 Orang terdiri dari 4 meninggal dan 15 orang luka luka 5 luka berat dan 10 orang lainnya luka ringan.
- d. Konflik sosial yang terjadi di pegunungan Bintang pada tanggal 18 september terjadi konflik bersenjata di kampung yapimakot. distrik serambakon kabupaten pegunungan Bintang, dari kejadian tersebut dalam data yang di peroleh dengan beberapa dinas terkait jumlah korban di informasikan sebanyak 101 orang, terdiri dari 1 orang meninggal, 0 orang hilang, 12 luka berat/inap. 10 luka ringan/rawan jalan, 88 orang pengusih

1.3 Penelitian Terdahulu

Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan, mitigasi bencana secara konseptual sebagai output, daerah rawan bencana kondisi empiris sebagai input, memproses Eksekutif dan legislatif sebagai proses dalam siklus kebijakan publik.

Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2020). Mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di universitas andalas. Adapun hasil penelitian ini secara umum kegiatan mitigasi bencana dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman gempa bumi di Universitas Andalas belum berjalan optimal.

Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Program mitigasi yang dilaksanakan BPBD Banjarnegara meliputi Mitigasi Struktural dan Non Struktural telah selesai dengan baik. Misalnya, database bencana, pemasangan Early Warning System (EWS), informasi dan sosialisasi, pelatihan dan simulasi bencana.

Manajemen perlucutan senjata yang melibatkan masyarakat : Belajar dari pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi Maluku pasca konflik. NAHUMARURY, Muhammad Abdul, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati (2005). tesis ini menghasilkan beberapa kesimpulan tentang prosedur manajemen perlucutan senjata di Maluku, yang pada intinya meliputi beberapa fase, antara lain (1) Confidence Building Measures (CBMs), yakni langkah awal untuk membangun kepercayaan dengan semua pihak yang bertikai, dengan prinsip universalitas dan imparial. (2) Stability Measures, sebagai bentuk penciptaan situasi keamanan yang stabil selama dan setelah perlucutan senjata berlangsung. (3) Weapons Management, yakni pengelolaan senjata-senjata yang telah dilucuti, dan (4) Pembentukan Joint Commission for Disarmament, sebagai suatu tawaran bagi efektifitas pelaksanaan perlucutan senjata di Maluku, sekaligus sebagai jawaban praktis tentang partisipasi aktif masyarakat dalam program ini.

Vina G. Gaghuaube (2021) PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL menghasilkan Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan serta pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik dan pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian dan perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik.

Ariesta (2014) PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR RAYA PADANG hasil penelitian Sistem budaya matrilineal tidak menjamin bahwa perempuan memiliki kekuatan lebih dalam upaya perdamaian. Contohnya adalah kasus konflik rehabilitasi dan rekonstruksi di Pasar Raya Padang pasca gempa 30 September 2009. Tulisan ini menjelaskan peran perempuan dalam konteks sistem budaya matrilineal Minangkabau dalam proses resolusi konflik di Pasar Raya Padang, rehabilitasi dan rekonstruksi.

RIEUWPASSA, Sarmalina, Drs. Lambang Trijono, M.A (2010) Pembangunan perdamaian pasca konflik : Studi kasus di Negeri/Desa Rumahtiga Kota Ambon hasil penelitian Dalam mewujudkan perdamaian antar komunitas ini dituntut adanya peran Institusi lokal yang terfokus pada masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat baik pada tingkat pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta diikuti sertakan pula Institusi sosial, keagamaan dan lembaga sosial masyarakat yang memberikan andil yang besar guna memberikan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi wadah untuk memproteksi setiap gejolak yang dapat ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam mengimplementasikan prinsip perdamaian di Desa Rumahtiga di optimalkan kembali sumberdaya yang ada di Desa Rumahtiga, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, kebutuhan finansial, seperti rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi masyarakat pasca konflik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menjaga dan membangun perdamaian di Desa Rumahtiga, masyarakat Rumahtiga harus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal dan peran lembaga-lembaga yang ada di Desa Rumahtiga, serta mempunyai komitmen bersama dalam mematuhi kesepakatan dan nilai-nilai pembangunan perdamaian yang telah disepakati bersama.

Alma'arif, Alma'arif (2014) MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten) menghasilkan Hasil studi

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan beberapa tindakan penanganan konflik sosial baik sebelum, pada saat dan setelah konflik. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB); pelaksanaan workshop penanggulangan gerakan radikalisme keagamaan; pembentukan satuan tugas (Satgas) Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (PKBB); pemanfaatan peran dinas Sosial; serta penyediaan SMS pengaduan KAMTIBMAS kepada masyarakat adalah beberapa tindakan penanganan konflik oleh Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Hambatan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan konflik sosial adalah belum adanya forum komunikasi lain selain FKUB; adanya pihak-pihak dari birokrasi yang potong kompas dalam mengurus izin pendirian bangunan rumah ibadah serta; belum adanya aturan pelaksana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 berupa Perda Provinsi maupun Peraturan Gubernur.

Amalia Hasanah Ismail (2017) Strategi Transformasi Konflik Search for Common Ground pada Konflik di Republik Demokratik Kongo (Studi Kasus Rehabilitasi Remaja Pasca Perang di Republik Demokratik Kongo) hasil Pelaksanaan program Search for Common Ground memiliki faktor pendukung seperti kondisi remaja yang memiliki pikiran kreatif dan inovatif, dapat dimobilisasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta hubungan yang baik dengan militer di Republik Demokratik Kongo.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu KINERJA DINAS SOSIAL DALAM REHABILITASI PASCA KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui serta menganalisis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan dalam rehabilitasi pasca konflik sosial. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam rehabilitasi pasca konflik sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dan perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya penulis mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu". Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:190) dalam bukunya

metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Rehabilitasi Pasca Konflik Sosial

Dalam bayang-bayang konflik sosial yang pernah mengguncang, kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan berdiri sebagai saksi perjuangan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan rehabilitasi pasca konflik. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya menjadi sorotan penting tentang bagaimana dinas tersebut mengelola dan memfasilitasi proses pemulihan masyarakat pasca konflik menjadi hal yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dalam upaya rehabilitasi pasca konflik sosial yang melanda Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan, kualitas layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya menjadi kunci penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi publik. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Untuk melihat bagaimana dimensi responsivitas menjadi salah satu penentu kinerja yang baik pada Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya, penulis mengkaji melalui dua indikator. Yang pertama yakni terjalankannya misi sesuai dengan rencana.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan

nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya berupaya memberikan akuntabilitas terbaik dalam kinerja mereka. Hal ini dapat dilihat dari Pelaksanaan Tugas dan Program Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Sedang Berlaku.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan sangat kompleks dan beragam. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Fasilitas yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung upaya rehabilitasi yang efektif dan efisien. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang rendah turut menjadi tantangan besar. Banyak tenaga kerja yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani situasi pasca konflik secara optimal. Temuan penelitian tersebut sama dengan temuan Vina G. Gaghuaube (2021) yang sama-sama menemukan peran pihak terkait dalam menangani konflik.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, dapat dikatakan cukup memuaskan. Penelitian yang dilakukan menilai kinerja organisasi melalui tiga indikator utama: kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah mencapai hasil yang memadai, sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Layanan yang diberikan berkualitas, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat cukup tinggi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program juga baik.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan peran Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya dalam menangani pasca konflik sosial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya beserta jajarannya, Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Alma'arif, A. A. (2014). MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten). *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1(1). [MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA \(Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan di Provinsi Banten\) - Repository IPDN](#)
- Ariesta, I. (2015). Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 41-52. [PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASAR RAYA PADANG | Ariesta | Jurnal Ilmu Sosial Mamangan \(upgrisba.ac.id\)](#)

- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121-134. [article.php\(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))
- Gaghuaube, V. G. (2022). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *LEX CRIMEN*, 10(13). [PEMULIHAN PASCA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | LEX CRIMEN\(unsrat.ac.id\)](http://PEMULIHAN_PASCA_KONFLIK_SOSIAL_BERDASARKAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_7_TAHUN_2012_TENTANG_PENANGANAN_KONFLIK_SOSIAL|LEX_CRIMEN(unsrat.ac.id))
- Ismail, A. H. (2017). Strategi Transformasi Konflik Search for Common Ground pada Konflik di Republik Demokratik Kongo (Studi Kasus Rehabilitasi Remaja Pasca Perang di Republik Demokratik Kongo). *Jurnal Transformasi Global*, 4(2). [Strategi Transformasi Konflik Search for Common Ground pada Konflik di Republik Demokratik Kongo \(Studi Kasus Rehabilitasi Remaja Pasca Perang di Republik Demokratik Kongo\) | Jurnal Transformasi Global](http://Strategi_Transformasi_Konflik_Search_for_Common_Ground_pada_Konflik_di_Republik_Demokratik_Kongo_(Studi_Kasus_Rehabilitasi_Remaja_Pasca_Perang_di_Republik_Demokratik_Kongo)|Jurnal_Transformasi_Global)
- NAHUMARURY, M. A. (2005). *Manajemen perlucutan senjata yang melibatkan masyarakat:: Belajar dari pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi Maluku pasca konflik* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). [Manajemen perlucutan senjata yang melibatkan masyarakat :: Belajar dari pengalaman rekonstruksi dan rehabilitasi Maluku pasca konflik\(ugm.ac.id\)](http://Manajemen_perlucutan_senjata_yang_melibatkan_masyarakat::_Belajar_dari_pengalaman_rekonstruksi_dan_rehabilitasi_Maluku_pasca_konflik(ugm.ac.id))
- Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2020). Mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di universitas andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 81-90. [Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas | Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN \(Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara\)](http://Mitigasi_Bencana_Dalam_Peningkatan_Kewaspadaan_Terhadap_Ancaman_Gempa_Bumi_Di_Universitas_Andalas|Jurnal_Ilmu_Administrasi_Negara_ASIAN_(Asosiasi_Ilmuwan_Administrasi_Negara))
- RIEUWPASSA, S. (2010). *Pembangunan perdamaian pasca konflik:: Studi kasus di Negeri/Desa Rumahtiga Kota Ambon* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). [Pembangunan perdamaian pasca konflik :: Studi kasus di Negeri/Desa Rumahtiga Kota Ambon\(ugm.ac.id\)](http://Pembangunan_perdamaian_pasca_konflik::_Studi_kasus_di_Negeri/Desa_Rumahtiga_Kota_Ambon(ugm.ac.id))
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica*, 1(1), 1-14. [KAJIAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA | Rahman | GEMA PUBLICA\(undip.ac.id\)](http://KAJIAN_MITIGASI_BENCANA_TANAH_LONGSOR_DI_KABUPATEN_BANJARNEGARA|Rahman|GEMA_PUBLICA(undip.ac.id))
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanto, Koko. (2012). Pencegahan dan Manajemen Bencana. *Jurnal Penanggulangan Bencana*. 14(3), 1-12

Peraturan

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana